



NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI BANTUL

Disampaikan
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul
Maret 2018

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul;

Yang kami hormati Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul;

Yang kami hormati Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bantul;

Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Bantul;

Yang kami hormati Sekda, Asisten, Tenaga Ahli Bupati, dan Staf Ahli Bupati
Bantul;

Yang kami hormati Kepala OPD se-Kabupaten Bantul;

Yang kami hormati Kepala BUMN/BUMD;

Teman-teman wartawan dan hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, rahmat, dan berkah-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu agenda pemerintahan kita, yaitu Rapat Paripurna terkait penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017.

Sebelum kami menjelaskan materi inti LKPJ, kiranya perlu kami sampaikan berbagai hal sebagai informasi untuk kita ketahui bersama:

Pertama, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, telah menjadi keprihatinan kita bersama. Hal ini menuntut adanya peningkatan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan upaya preventif dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

Kedua, kita juga prihatin dengan persoalan yang menjerat sebagian anak-anak didik kita, utamanya permasalahan *klithih*. Kenakalan remaja ini telah menciptakan perasaan ketidaknyamanan dan kekhawatiran masyarakat ketika berada di luar rumah. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian kita semua, baik pada level pemerintahan, dunia pendidikan, maupun masyarakat dan keluarga. Semoga dengan kerjasama yang baik, anak-anak kita bisa menyalurkan energi mereka untuk hal-hal yang positif.

Ketiga, *hoaks* merupakan permasalahan serius yang ada di masyarakat. Berita bohong tentang SARA yang disebarluaskan lewat media sosial dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat bisa mengancam ketenteraman dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu mari kita cerdaskan masyarakat kita supaya tidak mudah diadu domba melalui berita bohong.

Keempat, ke depan kita menghadapi tahun politik. Pada tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilu legislatif sebagai salah satu pesta demokrasi. Marilah kita ciptakan iklim yang sejuk untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan amanah.

Kelima, kita bersyukur bahwa berbagai prestasi dapat diraih, di antaranya:

- Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan Dinas Kesehatan mampu mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 untuk pelayanan publik;
- Tiga instansi yaitu RSUD, Disdukcapil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat sebagai *role model* pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB;
- Pada tahun 2017, RSUD Panembahan Senopati mempertahankan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Proper*) Peringkat Biru sejak tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Peringkat Biru adalah peringkat untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan yang taat dan sesuai dengan undang-undang;
- Kementerian Kesehatan RI menganugerahkan penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Wistara kepada Dinas Kesehatan;

- Kabupaten Bantul, melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai kabupaten paling aktif untuk input data Sistem Informasi Kredit Program;
- Dinas Pariwisata mendapatkan penghargaan Juara III Apresiasi Pesona Destinasi Indonesia untuk Desa Wisata Kaki Langit Mangunan; serta penghargaan Juara III Anugerah Pesona Indonesia “Surga Tersembunyi Populer” untuk Wana Wisata Budaya Mataram Dlingo;
- Predikat BB dari Menpan RB atas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Bantul yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi;
- Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan tertinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal kinerja pemerintahan daerah, yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Secara lengkap ada di dalam Lampiran Dokumen LKPJ. Marilah kita jadikan prestasi-prestasi tersebut sebagai pendorong untuk bersama-sama bekerja lebih giat demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peserta rapat paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kedua dari lima tahun periode RPJMD dan juga tahun kedua kami bertugas. Adapun garis besarnya adalah sebagai berikut:

Sebagai gambaran kondisi umum daerah, dapat kami sampaikan:

- Jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 928.676 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 927.181 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 462.449 jiwa dan perempuan sebanyak 464.732 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini karena adanya pemutakhiran data serta kesadaran masyarakat terhadap identitas tunggal.
- Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 528.161 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 558.980 jiwa.
- Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 3,12% atau 17.440 jiwa.

- Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 14,07% (130.454 jiwa), mengalami penurunan sebesar 0,47% dibanding tahun 2016 yang mencapai 14,54% (135.029 jiwa).
- Indeks pembangunan manusia tahun 2016 sebesar 78,42, lebih tinggi dari DIY (78,38) dan nasional (70,18).
- Kondisi ekonomi pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural, peran sektor primer terus mengalami pergeseran digantikan oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 13,16%, lebih kecil dibandingkan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25% dan sektor tersier sebesar 61,84%
- Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2017 berdasarkan harga konstan sebesar 4,52% atau mengalami perlambatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,06%. Hal ini dikarenakan beberapa sektor utama pendukung perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan.
- Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp21.275.000. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp22.925.000.
- Laju inflasi sebesar 3,96% pada tahun 2017, relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 4,20%, akan tetapi lebih tinggi apabila dibandingkan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,61%.
- Koefisien Gini pada tahun 2016 sebesar 0,3967 dan pada tahun 2017 diperkirakan menjadi 0,4126, lebih baik dari pada capaian DIY (0,4300), namun lebih tinggi dari pada capaian nasional (0,3910). Capaian ini masih dalam batas kewajaran, dan merupakan implikasi dari kecepatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ditekuni oleh bukan mayoritas penduduk, melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dilakukan mayoritas penduduk.

Peserta rapat paripurna yang kami hormati,

Dapat kami jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan

dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Pada sisi pendapatan, dapat kami sampaikan: target pendapatan tahun 2017 sebesar Rp2.095.073.460.546,68, realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar Rp2.086.739.683.071,45 atau 99,59%. Perihal tidak tercapainya target pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Target pendapatan asli daerah sebesar Rp458.042.255.770,19, realisasi sebesar Rp494.039.761.972,97 atau 107,79%,
- Target pendapatan transfer sebesar Rp1.628.151.082.518,49, realisasi sebesar Rp1.582.101.166.370,04 atau 97,17%,
- Target lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp8.880.122.258,00, realisasi sebesar Rp10.598.764.728,00 atau 119,35%.

Pada sisi belanja dan transfer daerah sebelum audit BPK-RI, dapat kami jelaskan:

- Anggaran belanja daerah sebesar Rp2.084.562.728.354,22 terrealisasi sebesar Rp1.839.161.109.207,60 atau 88,23%;
- Transfer daerah dianggarkan sebesar Rp246.132.769.585, terealisasi sebesar Rp237.090.406.211 atau 96,32%.

Perihal realisasi belanja hanya mencapai 88,23% disebabkan antara lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan yang gagal lelang, dan mundurnya penetapan perubahan APBD TA 2017.

Pada sisi pembiayaan daerah dapat kami uraikan:

- Anggaran pembiayaan sebesar Rp261.482.037.392,54;
- Realisasi sebesar Rp261.384.639.408,54 atau 99,96%, sebelum audit BPK-RI. Dengan rincian: Silpa tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp254.772.037.392,54 telah direalisasikan 100% dan penerimaan kembali investasi non permanen dianggarkan sebesar Rp6.710.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp6.612.602.016,00 atau 98,22%.

Yang terakhir, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp25.860.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.364.800.000,00 atau tercapai 94,22%, terdiri dari:

- Penyertaan investasi pemerintah daerah sebesar Rp17.150.000.000,00 dengan realisasi 100%;
- Pengeluaran investasi non permanen lainnya dianggarkan sebesar Rp8.710.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.214.800.000,00 atau 82,84%.

Peserta rapat yang terhormat,

Untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pembangunan pendidikan dapat digambarkan antara lain melalui:

- Angka Partisipasi Kasar:
 - ❖ SD/MI sebesar 98,20%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,08% dari capaian tahun 2016 sebesar 96,12%;
 - ❖ SMP/MTs sebesar 99,45%, melampaui tahun 2016 yang sebesar 95,00%;
- Angka Partisipasi Murni:
 - ❖ SD/MI sebesar 88,68%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yang sebesar 84,10%;
 - ❖ SMP/MTs sebesar 76,60%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yang sebesar 71,09%;

Persentase APK/APM yang tidak mencapai 100 tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anak Bantul mengikuti pendidikan di luar Bantul.

- Tingkat kelulusan:
 - ❖ SD/MI mencapai 100%, sesuai target;
 - ❖ SMP/MTs juga sebesar 100%, sama dengan tahun 2016;
- Angka putus sekolah:
 - ❖ SD/MI mencapai 0,01%, melampaui target 0,02%;
 - ❖ SMP/MTs sebesar 0,02%, sesuai target.
- Angka rata-rata lama sekolah:
 - ❖ Tercapai 9,40 tahun, melampaui target 8,84 tahun.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hasil yang diperoleh dalam pembangunan kesehatan antara lain:

- Angka Kematian Ibu sebesar 73,4 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu), lebih rendah atau lebih baik daripada target kematian ibu 87,5 per 100.000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Bayi sebesar 8,32, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 7,83 per 1.000 kelahiran hidup, namun masih lebih rendah dari target 8,75 per 1.000 kelahiran. Pada tahun 2017 terdapat 102 bayi meninggal dari 12.818 kelahiran hidup.
- Angka kesakitan DBD sebesar 57,34 per 100.000 penduduk (534 kasus) lebih rendah dibanding tahun 2016 yaitu 262,95 per 100.000 penduduk (2.442 kasus). Pada tahun 2017 terdapat dua kematian penderita DBD, menurun dibandingkan tahun 2016 di mana terjadi lima kematian.
- Pada tahun 2017 status gizi buruk pada Balita sebesar 0,41%, yaitu sebanyak 202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%.
- Angka kesembuhan TB tahun 2017 sebesar 72,8% melampaui target 85%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 60,8%.
- Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2017 sebesar 0,09%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 0,083%. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%.
- Usia Harapan Hidup sebesar 73,47 tahun, lebih baik dari tahun 2016 sebesar 73,44 tahun.

Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil yang diperoleh antara lain:

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebanyak 56 ruas jalan dengan total panjang 119,4 km tersebar di seluruh Kabupaten Bantul;
- Rehabilitasi/peningkatan jalan kabupaten sebanyak 30 ruas jalan dengan total panjang 33 km;
- Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi mantap total sepanjang 452,10 km atau 74,18%;
- Irigasi dalam kondisi baik sepanjang 188.541,38 meter atau 80,20%;
- Daerah irigasi yang terlayani seluas 7.007,35 Ha atau 81,16%.

- RDTR, Peraturan Zonasi, dan KLHS Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Dlingo;
- Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, dan Pundong.

Kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi *backlog* rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Upaya dan hasil yang diperoleh antara lain:

- Penanganan 557 unit rumah tidak layak huni;
- Operasional empat unit Rusunawa;
- Penataan kawasan kumuh di Pedukuhan Pacetan, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon;
- Penyediaan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri.

Dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Cakupan pelanggaran Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sebesar 100%;
- Target 14 kawasan tertib tercapai 100%;
- Cakupan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti tercapai 100%.

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penanganan permasalahan sosial menjadi tanggungjawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta. Upaya yang dilakukan dalam urusan sosial antara lain:

- Peningkatan pengurus 50 SDM panti dari 26 panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial;
- Layanan antar jemput klien psikotik sebanyak 76 kali ke atau dari rumah sakit atau panti rehab.

Peserta rapat dewan yang terhormat,

Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pembangunan ketenagakerjaan, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Angka pengangguran tahun 2017 sebesar 3,12% atau sebanyak 17.440 jiwa.

Dalam upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pembangunan berwawasan *gender* dan perlindungan anak, kebijakan yang ditempuh diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak.

Capaian pada urusan ini antara lain diperolehnya penghargaan tingkat Madya Kabupaten Layak Anak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera;
- Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah taman kanak-kanak;
- Optimalisasi Pokjanal Posyandu;
- Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan Balita.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Capaian pada urusan ini antara lain meliputi:

- Ketersediaan energi pada tahun 2017 sebesar 2.993 kilo kalori per kapita per hari dari target tahun 2017 sebesar 3.080 kilo kalori per kapita per hari atau pencapaian sebesar 97,18%.
- Ketersediaan protein pada tahun 2017 sebesar 78,36 gram per kapita per hari dari target tahun 2017 sebesar 72,2 gram per kapita per hari atau pencapaian sebesar 108,53%.
- Cadangan pangan pemerintah sampai tahun 2017 sebanyak 7,03 ton beras.

Urusan wajib pertanahan diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengembangan sistem pendaftaran tanah. Upaya yang dilakukan di antaranya:

- Pendaftaran 400 bidang tanah warga di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul lewat kegiatan Proda;

- Sertifikasi tanah kas desa sebanyak 54 bidang, rekomendasi Bupati ke Gubernur sebanyak 75 dan sosialisasi sebanyak empat kali mengenai pemanfaatan tanah kas desa;
- Program pendaftaran tanah sistem lengkap sejumlah 26.000 bidang;
- Pemanfaatan tanah *Sultan Ground* dengan mengajukan permohonan kekancingan sebanyak 14 bidang tanah.

Pada tahun 2017, indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 45,10. Capaian indeks ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 23,35. Hal ini disebabkan banyaknya penanaman pohon, pengendalian pencemaran air, dan meningkatnya kesadaran untuk tidak membakar sampah.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, difokuskan pada administrasi kependudukan yang meliputi dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil. Hasil yang dicapai dalam urusan kependudukan di antaranya adalah:

- Perekaman KTP elektronik tercapai 99,07%, mendekati target sebesar 100%. Target tersebut belum terpenuhi disebabkan oleh banyaknya penduduk yang pergi merantau atau menjadi TKI di luar negeri sehingga banyak yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan untuk pemula juga masih banyak yang belum melakukan perekaman.
- Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun mencapai 91,74%, melebihi target sebesar 81%.
- Inovasi SAPA 30 menit program “Siji Entuk Papat” (Situpat), yaitu NIK, akta, KK, dan KIA.

Peserta sidang yang terhormat,

Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi:

- Bantuan keuangan khusus kepada masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasana, pembangunan fisik obyek wisata, dan kawasan kuliner;

- Penyiapan masyarakat pengelola air bersih pedesaan;
- Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi desa;
- Pengembangan teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan lomba desa.

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara umum meliputi jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, persebaran penduduk yang tidak merata, dan beban ketergantungan yang tinggi. Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan capaian pada tahun 2017 antara lain:

- Pasangan usia subur sebanyak 145.476, menurun dari kondisi tahun 2016 sebanyak 149.683;
- Kepesertaan KB baru sebanyak 10.826 akseptor, tahun 2016 sebanyak 13.837;
- Angka *unmetneed* (pasangan usia subur yang mestinya ber-KB tapi belum melakukannya) sebesar 8,35%, tahun 2016 sebesar 5,87%.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan umum bidang perhubungan yang menjangkau masyarakat secara merata dengan kualitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan antara lain penyediaan pelayanan dasar berupa aksesibilitas transportasi, peningkatan ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil yang dicapai pada urusan ini antara lain meliputi:

- Persentase kendaraan bermotor yang lolos uji mencapai 87,42% atau sejumlah 17.578 kendaraan dari 20.000 kendaraan wajib uji. Hasil tersebut lebih besar dari target yang direncanakan sebesar 85,5%;
- Persentase ketersediaan simpul yang memadai mencapai 47%, sama dengan target yang direncanakan;
- 3.296 LPJU yang terpelihara;
- Jumlah rambu lalu lintas baru yang terpasang sebanyak 188 unit;
- Pengadaan dan pemasangan marka jalan berupa pengecatan marka jalan tahun 2016 sebanyak 1.373,43 m² dan tahun 2017 meningkat sebanyak 1.488,51 m²;
- Moda angkutan darat dilayani oleh tiga perusahaan angkutan umum yang mencakup 15 trayek dengan armada bus sebanyak 193 unit.

Dalam urusan komunikasi dan informatika, membangun *Bantul Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *e-Government* menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services*. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan layanan internet gratis;
- Bimbingan teknis untuk mendukung penerapan aplikasi sistem informasi desa seluruh pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul;
- Siaran Taman Gabusan TVRI, Wedang Ronde, Gardu Progotamansari;
- Terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing OPD;
- Dialog interaktif di radio.

Peserta rapat dewan yang terhormat,

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Pada tahun 2017 jumlah UKM mencapai 22.310 unit usaha dan menyerap 99.008 tenaga kerja. Jumlah UKM ini meningkat 3,4% dari tahun 2016 yang berjumlah 21.567 unit usaha dan menyerap 90.117 tenaga kerja.

Sampai dengan tahun 2017, koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul berjumlah 433 unit, terdiri dari 429 koperasi primer dan empat koperasi sekunder.

Dalam urusan penanaman modal, upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- Peningkatan pengelolaan perijinan.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan penanaman modal di antaranya:

- Pertumbuhan investasi mencapai 12,72%, melampaui target 8,60%;
- Layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu mencapai 70,98%;
- Indeks kepuasan masyarakat mencapai 83,08, melebihi target 78,5.

Dalam urusan kepemudaan dan olah raga, hasil yang dicapai antara lain:

- Sukses penyelenggaraan Porda DIY ke-14 sebagai Juara II;
- Juara umum pekan paralimpic pelajar daerah DIY tahun 2017 dengan meraih tujuh medali emas, tujuh medali perak, dan empat medali perunggu;
- Juara umum pekan olahraga pelajar daerah tingkat DIY tahun 2017 dengan perolehan 58 medali emas, 50 medali perak, dan 50 medali perunggu;
- Juara 1 tingkat nasional pemuda pelopor bidang sosial budaya dan pariwisata atas nama Arsa Rintoko;
- Juara 2 tingkat nasional pemuda pelopor bidang pengolahan SDA dan lingkungan atas nama Devriyanto.

Urusan statistik ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hasilnya antara lain perhitungan inflasi, Gini ratio, PDRB, dan Nilai Tukar Petani.

Dalam urusan persandian, upaya yang dilakukan di antaranya:

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- Penegakan Perda dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pada tahun 2017, indeks pembangunan kebudayaan adalah 57,01. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan cukup baik. Upaya yang dilakukan dalam urusan kebudayaan antara lain:

- Penyelenggaraan 488 pentas kesenian dan budaya daerah meliputi wayang, ketoprak, jathilan, reog, pentas seni religi, hadroh, dan lain-lain;
- Penyusunan database bidang kebudayaan.

Dalam urusan perpustakaan, peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Upaya yang dilakukan di antaranya meliputi:

- Pengembangan koleksi dari 102.292 buku pada tahun 2016 menjadi 104.300 buku pada tahun 2017;
- Peningkatan jumlah judul buku dari 38.782 judul pada tahun 2016 menjadi 40.300 judul pada tahun 2017;
- Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa dan komunitas;
- Pembentukan dan pelatihan pengolahan bahan pustaka perpustakaan sekolah, desa, masjid, dan komunitas.

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengurus arsip melalui bimbingan teknis bagi 135 orang petugas arsip;
- Meningkatkan sistem administrasi kearsipan melalui pembangunan *database* informasi kearsipan, pengklasifikasian data, pengadaan sarana penyimpanan, dan Perbub arsip dinamis;
- Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah.

Peserta rapat paripurna yang terhormat,

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan urusan pilihan. Urusan pilihan pertama adalah kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan Pantai Selatan sebagai beranda depan DIY dengan samudra sebagai *kamulyaning* rakyat. Produksi perikanan budidaya meningkat dari 11.363.724 kg pada tahun 2016 menjadi 12.027.236 kg pada tahun 2017. Demikian juga halnya, produksi perikanan tangkap meningkat dari 827,5 ton pada tahun 2016 menjadi 885,35 ton pada tahun 2017.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mencapai 7.917.586 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, mencapai Rp19.594.008.750,00. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan pemasaran pariwisata;
- Pengembangan destinasi pariwisata; dan
- Pengembangan kemitraan dalam bidang pariwisata.

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Hasil yang dicapai antara lain:

- Pada tahun 2017 pertumbuhan produksi tanaman pangan ditargetkan sebesar 0,101%, realisasinya sebesar 0,113%;
- Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan ditargetkan sebesar 0,150%, realisasinya sebesar 0,165%.

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, implementasi urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Bantul sangat terbatas, yakni hanya berkaitan dengan panas bumi. Melalui program potensi energi telah dilaksanakan kegiatan berupa pendataan potensi energi dengan *output* kajian geothermal di Parangwedang, Kretek. Hasil kajian ini adalah

energi panas bumi di Parangwedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C, sementara panas bumi di Parangwedang adalah 40°C. Energi panas bumi Parangwedang cocok dimanfaatkan untuk pariwisata.

Kebijakan pembangunan perdagangan diarahkan pada peningkatan aktivitas perdagangan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 antara lain meningkatnya kualitas pasar rakyat, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dan pertumbuhan ekspor. Hasil yang dicapai adalah:

- 25 pasar dalam kondisi baik;
- Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai kabupaten tertib ukur;
- Pasar Imogiri mendapatkan sertifikat pasar ber-SNI dari Badan Standarisasi Nasional;
- Kinerja nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar \$79.200.365, mengalami kenaikan sebesar 7,09% dibanding tahun 2016; dan
- Sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 8,92% dalam struktur PDRB Bantul, meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan kontribusi 8,46%.

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi, khususnya industri kecil menengah, yang mampu memberikan peningkatan produk domestik regional bruto daerah, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Potensi IKM yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 99.920 orang. Kontribusi PDRB sektor ini sebesar 15,17% dan laju pertumbuhan industri sebesar 3,47%. Pada tahun 2017 Bantul telah dinobatkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh Tim Pinilai Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia dari Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam urusan transmigrasi, quota yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat masih menjadi dasar implementasi program transmigrasi. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya quota transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah

animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 2016 sebanyak 50 KK;
- Tahun 2017 sebanyak 12 KK.

Penempatan transmigran tahun 2017 ke sejumlah daerah dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Simpang tiga SP 5, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah tiga KK atau 11 jiwa;
- UPT Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sejumlah dua KK atau empat jiwa;
- UPT Kabera, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah 2 KK atau 6 jiwa; dan
- UPT Parudongka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah 5 KK atau 17 jiwa.

Peserta rapat paripurna yang terhormat,

Fungsi penunjang urusan pemerintahan pertama adalah perencanaan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain:

- Penyusunan LKPJ;
- Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS;
- Pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan perencanaan umum hasil Musrenbang; dan
- Penyusunan perubahan RPJMD.

Fungsi penunjang pemerintahan yang kedua adalah keuangan. Upaya yang dilakukan di antaranya:

- Fasilitasi penyaluran belanja PPKD;
- Penyusunan analisa standar belanja;
- Penyusunan standar satuan harga;
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- Penyusunan Raperbup tentang penjabaran APBD;
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
- Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Uji kompetensi dan psikologi;
- Pendidikan dan pelatihan PNS;
- Pengembangan Diklat;
- Pengelolaan pendidikan PNS;
- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

Upaya yang dilakukan dalam fungsi penunjang penelitian dan pengembangan antara lain:

- Koordinasi, fasilitasi, dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi;
- Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan perguruan tinggi;
- Fasilitasi atau koordinasi pemberian CSR dari lembaga; dan
- Penyusunan kajian-kajian untuk pengembangan.

Fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM, dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengembangan wawasan kebangsaan;
- Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat; dan
- Pendidikan politik masyarakat.

Pengawasan merupakan fungsi penunjang pemerintahan berikutnya. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar, melalui upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan kepala daerah. Hasil temuan pengawasan selanjutnya wajib ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD, LHP ADTT, LHP Kinerja Inspektorat, dan LHP pemeriksaan khusus kepada OPD atau unit kerja obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 91,78% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Fungsi penunjang pemerintahan umum dengan hasil di antaranya:

- 26 Raperda disetujui oleh DPRD;
- Dokumen kajian kebijakan pengembangan investasi dan kerjasama;
- Tersusunnya 45 Memorandum of Understanding dan 108 perjanjian kerjasama;
- Pemasangan 25 titik pilar batas wilayah Kabupaten Bantul dengan wilayah Kabupaten Gunungkidul;
- Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peserta rapat paripurna yang terhormat,

Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian RI. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas pembantuan antara lain adalah:

- Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; dan
- Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

- Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan daerah atau institusi lain berjumlah 12 MoU dan 37 perjanjian kerjasama.
- Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan berjumlah 32 MoU dan 69 perjanjian kerjasama.
- Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah yang dilaksanakan 12 kali, diikuti Forkompinda dalam rangka menjaga stabilitas

keamanan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Telah dilaksanakan pemasangan 25 pilar batas wilayah.
- Telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- Kondisi wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahunnya adalah tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang, dan abrasi/erosi, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran.
- Kawasan strategis di Kabupaten Bantul meliputi kawasan perkotaan Yogyakarta; kawasan strategis Bantul Kota Mandiri; kawasan strategis pantai Selatan; kawasan strategis industri Sedayu dan Piyungan; kawasan strategis desa wisata dan kerajinan Gabusan-Manding-Tembi dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi; dan kawasan strategis gumuk pasir Parangtritis. Untuk mewujudkan kawasan strategis tersebut dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan, yaitu di antaranya melalui peningkatan infrastruktur kawasan, penataan, dan pengendalian pemanfaatan lahan.
- Angka kriminalitas pada tahun 2017 adalah 7,4 kasus per 10.000 penduduk dengan rincian di antaranya terjadi 395 kasus pencurian, 76 kasus penipuan, 46 kasus Narkoba, 29 kasus kejahatan seksual, dan 2 kasus pemalsuan uang.

Hadirin yang saya hormati,

Sejak tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan indikator kinerja sasaran pembangunan. Indikator kinerja tersebut ditetapkan di dalam RPJMD untuk setiap tahun selama lima tahun. Disebabkan LKPJ juga merupakan evaluasi terhadap RPJMD yang ada, maka capaian indikator kinerja sasaran pembangunan bisa dikatakan sebagai salah

satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk tahun 2017, terdapat 19 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Jika diukur dengan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 94,44% atau disebut kategori sangat tinggi.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, dapat disampaikan realisasi *cash-inflow* tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.348.125.322.479,99, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2.086.739.683.071,45 dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp261.385.639.408,54; sementara realisasi *cash-outflow* adalah sebesar Rp2.101.281.676.555,60 terdiri dari belanja dan transfer daerah sebesar Rp2.076.916.876.555,60 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp24.364.800.000,00. Dengan demikian terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar Rp246.843.645.924,39 (sebelum audit BPK).

Akhirnya dengan semangat kebersamaan, mari kita gelorakan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Bantul. Amin.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Bupati Bantul,

Drs. H. Suharsono